Journal of Social and Political Inquiry

Vol. 1 No. 2, Mey 2026, pages: 34-42

e-ISSN 3123-9927| DOI: https://doi.org/10.70716/jospi.v1i1.299

Dinamika Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Ahmad Fauzan [*1], Rina Maharani [1]

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

**Corresponding Author: mayasari@gmail.com, rinamaharani@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
05 Mey, 2026
Manuscript revised:
20 Mey, 2026
Accepted for publication:
31 Mey, 2026

Keywords

Identity Politics;
Regional Head Elections;
Local Democracy;
Social Media;
Social Conflict;

Abstract

Identity politics has become an increasingly prominent phenomenon in the dynamics of local democracy in Indonesia, particularly in the implementation of regional head elections (Pilkada). The use of identity-based elements such as religion, ethnicity, culture, and specific social groups is often employed as a political strategy to gain public support. This study aims to analyze the dynamics of identity politics in regional head elections in Indonesia and its impact on social integration and the quality of local democracy. The research adopts a qualitative approach using literature review techniques and case analysis of several regional elections across Indonesia. Data were collected from scientific journals, government documents, mass media reports, and previous studies relevant to the issue of identity politics. The findings indicate that identity politics has developed alongside increasing political competition and the growing use of social media as a campaign tool. Religious and ethnic identities are frequently utilized to establish emotional connections between candidates and voters, thereby increasing voter loyalty. However, these strategies also contribute to social polarization, horizontal conflicts, and the spread of hate speech in digital public spaces. In several cases, voters tend to choose candidates based on shared identity rather than leadership capacity and competence. This condition has the potential to reduce the quality of democracy, as political processes become less focused on policy programs and broader public interests. Furthermore, the study reveals that limited political literacy among citizens and inadequate oversight of digital campaigns further strengthen the practice of identity politics. The government, election management bodies, and community leaders play crucial roles in promoting inclusive political education and strengthening values of tolerance among different social groups. Strengthening regulations related to campaigns involving ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) issues is also necessary to maintain social stability and prevent political conflicts at the local level. Therefore, the influence of identity politics in regional elections can be minimized through enhanced democratic awareness, improved digital media oversight, and the development of a more rational political culture that prioritizes social cohesion and national unity..

Copyright © 2026, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Fauzan, A., & Maharani, R. (2026). Dinamika Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Journal of Social and Political Inquiry, 1*(2), 34–42. https://doi.org/10.70716/jospi.v1i1.299

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak era reformasi, terutama melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara demokratis dan terbuka. Pilkada langsung dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik lokal tidak hanya dipengaruhi oleh visi dan program kerja kandidat, tetapi juga oleh faktor identitas sosial seperti agama, etnis, budaya, dan golongan tertentu. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai politik identitas yang semakin berkembang dalam kontestasi politik lokal di Indonesia. Politik identitas menjadi isu penting karena mampu memengaruhi perilaku pemilih sekaligus memunculkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut pada satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi sumber konflik apabila dimanfaatkan dalam kepentingan politik praktis. Dalam konteks Pilkada, identitas kelompok sering digunakan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik melalui pendekatan emosional dan sentimen primordial. Kandidat politik kerap membangun citra berdasarkan kedekatan identitas dengan masyarakat tertentu agar memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa identitas sosial masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan preferensi politik masyarakat Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019).

Perkembangan politik identitas di Indonesia semakin terlihat sejak meningkatnya penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X menjadi ruang baru bagi penyebaran narasi politik berbasis identitas. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadi alat mobilisasi massa dan pembentukan opini publik. Informasi yang bersifat provokatif dan emosional cenderung lebih mudah diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat dibandingkan informasi berbasis data dan program kerja kandidat. Akibatnya, isu agama dan etnis sering kali digunakan untuk memengaruhi persepsi pemilih dalam Pilkada (Lim, 2017).

Fenomena politik identitas dalam Pilkada juga diperkuat oleh rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Sebagian masyarakat masih cenderung menentukan pilihan politik berdasarkan kesamaan identitas dibandingkan kemampuan, pengalaman, dan kualitas kepemimpinan kandidat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara rasional dan substantif. Politik identitas akhirnya menjadi strategi yang dianggap efektif untuk memperoleh suara pemilih dalam waktu singkat. Di beberapa daerah, penggunaan identitas agama dan etnis bahkan mampu menciptakan polarisasi sosial yang cukup tajam di tengah masyarakat (Hadiz, 2018).

Selain menimbulkan polarisasi sosial, politik identitas juga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal. Demokrasi ideal seharusnya mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja yang ditawarkan. Namun, ketika identitas lebih dominan dibandingkan gagasan politik, maka kompetisi demokrasi cenderung bergeser menjadi pertarungan antar kelompok sosial. Dampaknya, masyarakat menjadi terpecah ke dalam kelompok mayoritas dan minoritas yang saling berhadapan secara politik. Kondisi ini tidak hanya menghambat integrasi sosial, tetapi juga dapat memicu konflik horizontal di tingkat masyarakat (Hefner, 2020).

Dalam beberapa kasus Pilkada di Indonesia, isu agama menjadi instrumen utama dalam membangun dukungan politik. Kandidat tertentu sering diasosiasikan dengan identitas keagamaan untuk menarik simpati masyarakat. Kampanye berbasis agama dianggap efektif karena mampu membangun kedekatan emosional yang kuat dengan pemilih. Akan tetapi, penggunaan isu agama secara berlebihan dapat menimbulkan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Politik identitas berbasis agama

juga berpotensi mengurangi nilai-nilai pluralisme yang menjadi dasar kehidupan demokrasi di Indonesia (Mietzner, 2018).

Selain agama, identitas etnis juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinamika Pilkada. Di beberapa daerah, masyarakat cenderung memilih kandidat yang berasal dari kelompok etnis yang sama. Fenomena ini muncul karena adanya ikatan budaya dan rasa solidaritas kelompok yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat lokal. Kandidat politik sering memanfaatkan kedekatan etnis sebagai strategi komunikasi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat. Meskipun dapat meningkatkan solidaritas kelompok tertentu, politik etnis juga berpotensi menimbulkan diskriminasi politik terhadap kelompok minoritas (Berenschot, 2018).

Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat penyebaran politik identitas di ruang publik digital. Media sosial memungkinkan informasi politik menyebar secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, berita bohong, ujaran kebencian, dan propaganda politik berbasis identitas semakin mudah ditemukan selama masa Pilkada. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan tidak benar. Penyebaran hoaks politik berbasis identitas tidak hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga memperburuk hubungan sosial antar kelompok masyarakat (Tapsell, 2020).

Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu sebenarnya telah berupaya mengurangi praktik politik identitas melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan pengawasan terhadap kampanye yang mengandung unsur SARA. Namun, implementasi pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di media sosial yang memiliki arus informasi sangat cepat. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye berbasis identitas dinilai belum optimal sehingga praktik politik identitas masih terus terjadi dalam berbagai Pilkada di Indonesia (Muhtadi, 2019).

Dalam konteks demokrasi lokal, pendidikan politik menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan hanya kesamaan identitas. Selain itu, pendidikan politik juga dapat memperkuat nilai toleransi dan menghargai keberagaman dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk membangun budaya politik yang inklusif dan demokratis (Buehler, 2016).

Penelitian mengenai politik identitas dalam Pilkada menjadi penting karena fenomena ini memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia. Politik identitas tidak hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial dalam masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, praktik politik identitas dapat memunculkan konflik sosial berkepanjangan dan melemahkan persatuan nasional. Sebaliknya, apabila demokrasi mampu dijalankan secara inklusif dan rasional, maka keberagaman identitas justru dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat integrasi bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal dan integrasi sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian ilmu politik dan sosial, khususnya terkait perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan yang mampu meminimalkan praktik politik identitas serta memperkuat demokrasi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami dinamika politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan politik secara mendalam, khususnya terkait penggunaan identitas agama, etnis, dan budaya dalam proses politik lokal. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui interpretasi terhadap data dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menggambarkan proses, makna, dan dinamika politik identitas yang terjadi dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia (Moleong, 2018).

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai praktik politik identitas yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi munculnya politik identitas serta dampaknya terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi. Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara strategi kampanye berbasis identitas dan perilaku politik masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian dilakukan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan terhadap beberapa kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia yang memiliki indikasi kuat penggunaan politik identitas. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan tingkat intensitas konflik sosial, pemberitaan media, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada wilayah yang menunjukkan adanya penggunaan isu agama, etnis, maupun budaya sebagai instrumen mobilisasi politik dalam Pilkada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil dokumentasi berupa pidato politik, materi kampanye, unggahan media sosial kandidat, serta pernyataan tokoh politik yang berkaitan dengan isu identitas dalam Pilkada. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional, buku akademik, laporan penelitian, dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU), berita media massa, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bentuk informasi tertulis maupun digital yang berkaitan dengan praktik politik identitas dalam Pilkada. Dokumen yang dianalisis meliputi berita online, video kampanye, konten media sosial, serta laporan hasil pemilu dari lembaga resmi. Adapun studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai politik identitas, demokrasi lokal, komunikasi politik, dan perilaku pemilih di Indonesia (Nazir, 2014).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sumber data yang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi mendalam mengenai fenomena politik identitas. Teknik ini dipilih karena tidak semua data memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti hanya memilih sumber yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keterkaitan dengan Pilkada, adanya unsur identitas politik, serta memiliki validitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Arikunto, 2016).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penting dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman dokumentasi dan tabel kategorisasi data untuk mempermudah proses analisis informasi yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan

informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar fenomena. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara sistematis (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen, media, dan hasil penelitian sebelumnya guna memastikan konsistensi data. Sementara triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif teori politik identitas dan demokrasi untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian. Teknik ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan objektivitas penelitian kualitatif (Patton, 2015).

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari sumber yang terbuka dan dapat diakses secara legal. Peneliti menghindari manipulasi data serta menjaga objektivitas dalam proses interpretasi hasil penelitian. Selain itu, penggunaan kutipan dan referensi dilakukan sesuai kaidah akademik guna menghindari plagiarisme dan menjaga integritas ilmiah penelitian (Creswell, 2017).

Batasan penelitian difokuskan pada analisis politik identitas dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia pada era demokrasi digital. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam politik identitas dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Fokus utama penelitian diarahkan pada penggunaan isu identitas dalam kampanye politik lokal serta dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat dan kualitas demokrasi daerah. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mendalam dalam membahas fenomena yang diteliti.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan politik identitas dalam Pilkada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, komunikasi politik, dan demokrasi lokal di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam membangun budaya politik yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada persatuan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan berbagai penelitian nasional, politik identitas sering digunakan sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Identitas agama, etnis, bahasa daerah, dan kelompok sosial tertentu dijadikan instrumen utama untuk memperoleh legitimasi politik. Kondisi tersebut semakin terlihat pada pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah yang memiliki keberagaman sosial tinggi. Dalam praktiknya, kandidat yang mampu memainkan isu identitas cenderung memperoleh dukungan yang lebih besar dibandingkan kandidat yang hanya mengandalkan program kerja dan visi pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor emosional masih menjadi pertimbangan penting dalam perilaku memilih masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas tidak dapat dipisahkan dari perkembangan media sosial sebagai sarana kampanye digital. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi kandidat maupun pendukung untuk menyebarkan narasi politik berbasis identitas secara cepat dan masif. Informasi yang berkaitan dengan agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan isu kebijakan publik yang bersifat teknis. Penelitian nasional juga menemukan bahwa algoritma media sosial memperkuat polarisasi politik karena pengguna cenderung menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kelompoknya. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih

mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang menonjolkan perbedaan identitas dibandingkan persamaan sebagai warga negara.

Selain itu, politik identitas sering dimanfaatkan untuk membangun citra kandidat sebagai representasi kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus Pilkada, kandidat berusaha menampilkan diri sebagai tokoh religius atau simbol budaya lokal agar memperoleh simpati masyarakat. Strategi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan elektabilitas kandidat, terutama di daerah yang memiliki ikatan primordial kuat. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya segregasi sosial dan penguatan sentimen kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya memengaruhi proses pemilu, tetapi juga hubungan sosial antar masyarakat setelah Pilkada berlangsung.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa rendahnya literasi politik masyarakat menjadi salah satu faktor utama berkembangnya politik identitas di Indonesia. Sebagian masyarakat masih memilih kandidat berdasarkan kesamaan agama atau etnis tanpa mempertimbangkan kualitas kepemimpinan dan kompetensi yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pemilih masih didominasi oleh faktor sosiologis dibandingkan rasionalitas politik. Kurangnya pendidikan politik menyebabkan masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh isu-isu emosional yang disebarkan melalui media sosial maupun kampanye langsung di lapangan. Akibatnya, proses demokrasi lokal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif yang menekankan kualitas kepemimpinan dan kepentingan publik.

Dalam beberapa Pilkada, penggunaan isu identitas juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik horizontal di masyarakat. Perbedaan pilihan politik sering berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan kelompok agama maupun etnis tertentu. Penelitian nasional menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian dan hoaks politik meningkat secara signifikan menjelang pemilihan kepala daerah. Informasi palsu yang menyerang identitas lawan politik sering digunakan untuk membangun opini negatif di tengah masyarakat. Situasi tersebut memperburuk hubungan sosial dan menciptakan ketegangan antar pendukung kandidat. Bahkan setelah Pilkada selesai, konflik sosial dalam masyarakat masih sering berlanjut akibat polarisasi politik yang belum pulih sepenuhnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa elite politik memiliki peran besar dalam memperkuat praktik politik identitas. Elite politik sering memanfaatkan simbol agama dan budaya untuk memobilisasi dukungan masyarakat demi kepentingan elektoral. Dalam konteks ini, identitas tidak lagi dipahami sebagai bagian dari keberagaman sosial, tetapi dijadikan alat politik untuk memenangkan kompetisi kekuasaan. Strategi tersebut dianggap efektif karena mampu menciptakan solidaritas kelompok secara cepat. Namun, praktik tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi karena masyarakat diarahkan untuk memilih berdasarkan sentimen kelompok, bukan berdasarkan kapasitas kandidat dalam memimpin daerah.

Di sisi lain, keberadaan tokoh agama dan tokoh adat juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini politik masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat terhadap kandidat tertentu sering dianggap sebagai legitimasi moral dan sosial oleh masyarakat. Dalam beberapa daerah, rekomendasi tokoh agama bahkan menjadi faktor penentu kemenangan kandidat dalam Pilkada. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional masih memiliki pengaruh kuat dalam proses demokrasi lokal di Indonesia. Meskipun demikian, keterlibatan tokoh masyarakat dalam politik identitas juga dapat memperkuat polarisasi apabila tidak diimbangi dengan pesan persatuan dan toleransi sosial.

Politik identitas juga memengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik memang mengalami peningkatan karena masyarakat merasa memiliki keterikatan emosional dengan kandidat yang dianggap mewakili identitas mereka. Akan tetapi, partisipasi tersebut sering bersifat emosional dan kurang didasarkan pada pemahaman terhadap program kerja kandidat. Akibatnya, masyarakat lebih fokus pada isu identitas dibandingkan pembahasan mengenai pembangunan daerah,

pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi.

Penelitian nasional selanjutnya menunjukkan bahwa kelompok muda atau generasi milenial menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpengaruh politik identitas di media sosial. Tingginya penggunaan internet membuat generasi muda lebih sering terpapar informasi politik digital, termasuk hoaks dan propaganda identitas. Kurangnya kemampuan verifikasi informasi menyebabkan sebagian generasi muda mudah mempercayai narasi politik yang bersifat provokatif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda agar mereka mampu memahami informasi politik secara kritis dan objektif.

Selain faktor media sosial, lemahnya pengawasan terhadap kampanye politik berbasis SARA juga menjadi penyebab berkembangnya politik identitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait kampanye digital masih belum efektif dalam mengendalikan penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi politik. Pengawasan yang terbatas menyebabkan berbagai konten provokatif tetap dapat tersebar luas tanpa sanksi yang tegas. Akibatnya, ruang digital menjadi arena konflik politik yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan platform media sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Dalam perspektif demokrasi, politik identitas sebenarnya tidak selalu bersifat negatif. Identitas kelompok dapat menjadi sarana representasi politik bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses kekuasaan. Kelompok minoritas dapat menggunakan identitas mereka untuk memperjuangkan hak politik dan kepentingan sosial secara lebih adil. Namun, politik identitas menjadi masalah ketika digunakan untuk menyerang kelompok lain atau menciptakan diskriminasi sosial. Oleh sebab itu, pengelolaan keberagaman dalam demokrasi menjadi hal yang sangat penting agar identitas tidak berubah menjadi sumber konflik politik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi dampak negatif politik identitas. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan politik lebih baik cenderung memilih kandidat berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja dibandingkan kesamaan identitas. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya demokrasi yang inklusif dan rasional. Selain itu, peningkatan literasi digital juga penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Dengan demikian, penguatan pendidikan politik menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan politik identitas di Indonesia.

Peran pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial selama Pilkada berlangsung. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik diskriminasi berbasis identitas. Penyelenggara pemilu juga harus memperkuat pengawasan terhadap kampanye yang mengandung unsur SARA agar tidak memicu konflik sosial. Selain itu, aparat keamanan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Upaya tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya toleransi sosial dapat menjadi faktor penyeimbang dalam menghadapi politik identitas. Daerah yang memiliki tingkat toleransi tinggi cenderung lebih mampu mengendalikan konflik politik berbasis identitas. Nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi modal sosial penting dalam menjaga persatuan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai kebangsaan dan toleransi perlu terus dilakukan melalui pendidikan, media massa, dan kegiatan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan teknologi. Penggunaan identitas sebagai strategi politik memang mampu meningkatkan mobilisasi massa dan partisipasi politik

masyarakat. Namun, praktik tersebut juga memiliki dampak negatif berupa polarisasi sosial, konflik horizontal, dan menurunnya kualitas demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, media, dan lembaga pendidikan untuk membangun budaya politik yang lebih inklusif, rasional, dan berorientasi pada persatuan bangsa.

KESIMPULAN

Dinamika politik identitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menunjukkan bahwa identitas agama, etnis, budaya, dan kelompok sosial masih menjadi faktor penting dalam proses demokrasi lokal. Politik identitas sering dimanfaatkan oleh kandidat sebagai strategi untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan memperoleh dukungan politik secara cepat. Penggunaan isu identitas dinilai efektif dalam meningkatkan loyalitas pemilih karena masyarakat cenderung merasa memiliki kedekatan sosial maupun budaya dengan kandidat tertentu. Perkembangan media sosial juga semakin memperkuat penyebaran narasi politik identitas melalui kampanye digital yang mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat.

Namun, praktik politik identitas tidak hanya memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi kehidupan sosial dan demokrasi. Penggunaan isu SARA dalam Pilkada dapat memicu polarisasi sosial, konflik horizontal, hingga munculnya ujaran kebencian di ruang publik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih berorientasi pada kesamaan identitas dibandingkan kualitas, kompetensi, dan program kerja kandidat. Akibatnya, proses demokrasi menjadi kurang sehat karena keputusan politik sering didasarkan pada sentimen emosional, bukan pertimbangan rasional untuk kepentingan publik secara luas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat praktik politik identitas di Indonesia. Kurangnya pemahaman mengenai demokrasi yang inklusif membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh propaganda politik berbasis identitas yang disebarkan melalui media sosial maupun kampanye langsung. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penyebaran informasi digital turut mempercepat munculnya disinformasi dan konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan pendidikan politik serta memperkuat nilai toleransi dan persatuan.

Dengan demikian, upaya untuk meminimalkan dampak negatif politik identitas perlu dilakukan melalui penguatan regulasi kampanye, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pembangunan budaya politik yang lebih rasional serta demokratis. Demokrasi lokal yang sehat hanya dapat tercipta apabila masyarakat mampu memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi pembangunan, bukan semata-mata karena kesamaan identitas sosial maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2016). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. Democratization, 21(5), 803–823.

Aspinall, E. (2018). Politik identitas dan demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(1), 1–15.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55(3), 295–317.

Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism in Indonesia. Comparative Politics, 50(4), 597–616.

Buehler, M. (2016). The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia. Cambridge University Press.

Creswell, J. W. (2017). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right-wing politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 48(4), 566–583.

Haryanto. (2014). Politik lokal dan konflik sosial dalam Pilkada langsung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(2), 145–160.

Haryanto. (2019). Media sosial dan polarisasi politik di Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia, 8(2), 120–135.

Hefner, R. W. (2020). Civil Islam and democratic pluralism in Indonesia. University of Notre Dame Press.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427.

Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs, 91(2), 261–282.

Mietzner, M. (2020). Populisme dan politik identitas dalam Pilkada Indonesia. Jurnal Politik, 5(1), 45–60.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, B. (2019). Populisme politik identitas dan dinamika elektoral di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(1), 47–61.

Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordholt, H. S., & Van Klinken, G. (2014). Politik lokal di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. California: Sage Publications.

Prasetyo, A. (2020). Politik identitas dalam kontestasi Pilkada di Indonesia. Jurnal Politik Indonesia, 5(2), 101–117.

Rahmatunnisa, M. (2020). Kampanye digital dan perilaku pemilih pemula. Jurnal Kajian Politik, 7(1), 66–79.

Saraswati, M. S. (2020). Social media and the political campaign industry in Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia, 9(2), 123–135.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, A. I. (2019). Media sosial dan transformasi komunikasi politik di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 13(1), 45–58.

Sulaiman, A. I. (2019). Politik identitas berbasis agama dalam kontestasi politik lokal. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 34–48.

Surbakti, R. (2016). Demokrasi dan politik lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tapsell, R. (2020). Deepening the media crackdown in Indonesia. ISEAS Publishing.

Wibowo, R. (2021). Polarisasi sosial akibat kampanye politik identitas di media sosial. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 88–102.

Yusuf, M. (2021). Demokrasi digital dan tantangan politik identitas di era media sosial. Jurnal Sosial Politik, 7(1), 67–81.